
Evaluasi Program Pembinaan Kemandirian Dalam Kesiapan Hidup Bermasyarakat Menggunakan Model Evaluasi Cse-Ucla Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Muara Enim

Ferdian Ramdani¹, Wido Cepaka Warih²

^{1,2}Politeknik Pengayoman Indonesia

ferdianramdani0302@gmail.com¹, wido.cepaka@gmail.com²

ABSTRACT; *This study aims to evaluate the implementation of the independence development program for inmates at the Class IIB Muara Enim Penitentiary, with a focus on their readiness for social reintegration after serving their sentences. Using the CSE-UCLA evaluation model, this study assesses the effectiveness and alignment between program objectives and implementation, and identifies factors that support and hinder the program's success. The method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, field observations, and documentation studies. Research informants included prison officers, inmates participating in the program, and other related parties. The results of the study indicate that although this program provides practical skills for inmates, such as bakery, sewing, batik, barbershop, and carpentry, there are a number of obstacles, including limited facilities, lack of motivation from inmates, and limited opportunities to market the resulting products. The program is also not fully structured and lacks the involvement of external professional instructors, which hinders further skill development. This study recommends improvements in program planning, improvements to facilities and infrastructure, and expansion of external partnerships to support sustainability and long-term impact on inmates after release.*

Keywords: *Program Evaluation, Self-Reliance Development, CSE-UCLA Model.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, dengan fokus pada kesiapan mereka untuk reintegrasi sosial setelah menjalani masa pidana. Menggunakan model evaluasi CSE-UCLA, penelitian ini menilai efektivitas dan kesesuaian antara tujuan program dengan pelaksanaannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan program tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi petugas lapas, narapidana yang mengikuti program, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini memberikan keterampilan praktis bagi warga binaan, seperti di bidang bakery, menjahit, batik, barbershop, dan pertukangan kayu, terdapat sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan fasilitas, kurangnya motivasi dari narapidana, serta terbatasnya peluang untuk

memasarkan produk yang dihasilkan. Program ini juga belum sepenuhnya terstruktur dengan baik dan kurang melibatkan instruktur profesional eksternal, yang menghambat pengembangan keterampilan lebih lanjut. Penelitian ini merekomendasikan adanya perbaikan dalam perencanaan program, peningkatan sarana dan prasarana, serta perluasan kemitraan dengan pihak luar untuk mendukung keberlanjutan dan dampak jangka panjang bagi narapidana setelah bebas.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Pembinaan Kemandirian, Model CSE-UCLA.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan di Lapas Kelas IIB Muara Enim, dengan fokus pada persiapan reintegrasi sosial setelah masa pidana. Menggunakan model evaluasi CSE-UCLA, penelitian ini menilai sejauh mana program tersebut berjalan sesuai perencanaan dan efektivitasnya dalam membekali narapidana dengan keterampilan yang relevan. Penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan program tersebut¹.

Tujuan dari program ini bukan untuk kepentingan profit, melainkan untuk membantu narapidana menggali bakat dan minat yang terpendam, serta mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan untuk hidup mandiri setelah bebas dari Lapas. Hal ini sejalan dengan pandangan Amalia (2021), yang menyatakan bahwa pembinaan kemandirian berfokus pada pengembangan kemampuan narapidana untuk berkreativitas dalam menghasilkan barang atau jasa, serta mempersiapkan mereka untuk kembali berkontribusi kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji persepsi warga binaan terhadap program tersebut apakah mereka merasa terbantu dan apakah terdapat kesenjangan antara tujuan program dengan hasil di lapangan².

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999, pasal 2 ayat 1, program pembinaan di Lapas mencakup aspek kepribadian dan kemandirian untuk mengembalikan

¹ Regina Ibrahim, "Evaluasi Program Pembinaan Kemandirian BIMKER Pastar Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar," *Esensi Pendidikan Inspiratif* 6, no. 4 (2024), <https://journalversa.com/s/index.php/epi/article/view/3298>.

² Hermansyah Hermansyah, Imaduddin Hamzah, and Budi Priyatmono, "Peran Dukungan Motivasi Dari Keluarga Terhadap Partisipasi Narapidana Dalam Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4873–81.

kepercayaan diri narapidana. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah narapidana menjadi individu yang produktif dan diterima oleh masyarakat. Pembinaan kemandirian bertujuan memberikan pelatihan keterampilan yang memadai, sehingga narapidana dapat bersaing di dunia kerja atau bahkan membuka usaha sesuai dengan keterampilan yang telah mereka pelajari. Namun, data dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2023) menunjukkan bahwa meskipun target pencapaian warga binaan mandiri dan berdayaguna pada tahun 2023 tercapai 98,32%, pelaksanaan program pembinaan kemandirian di lapangan masih memiliki kekurangan. Beberapa narapidana berhasil memanfaatkan keterampilan yang diperoleh selama masa pidana untuk memulai kehidupan baru, namun ada juga yang mengulangi tindak pidana setelah bebas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, ada celah dalam sistem pembinaan yang perlu dievaluasi. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian ini antara lain adalah terbatasnya fasilitas, kurangnya motivasi dari narapidana, dan hambatan sosial seperti stigma negatif dari masyarakat yang menghambat mereka dalam mencari pekerjaan. Motivasi menjadi faktor krusial dalam keberhasilan program ini, karena tanpa dorongan internal yang kuat, narapidana cenderung menjalani program sebagai formalitas semata. Ini menyebabkan keterampilan yang diperoleh tidak dikuasai dengan baik dan sulit diterapkan setelah mereka bebas³.

Evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan model CSE-UCLA penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program ini. Model ini memungkinkan pengukuran efektivitas program melalui analisis input, proses, dan hasil. Dengan demikian, evaluasi ini memberikan pandangan berharga yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pembinaan dan mengoptimalkan program agar lebih relevan dengan kebutuhan narapidana serta meningkatkan kesiapan mereka untuk reintegrasi sosial. Melalui penelitian ini, diharapkan akan ada rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan program pembinaan, baik dari sisi fasilitas, metode pelatihan, hingga motivasi narapidana. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas program di Lapas Kelas IIB Muara Enim, tetapi juga untuk menjadi referensi bagi lembaga pemasyarakatan lainnya yang berusaha meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian. Evaluasi program ini akan sangat berguna untuk memastikan keberlanjutan reintegrasi sosial narapidana dan pada akhirnya berkontribusi

³ Rahmatullah, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lapas Kelas Ii B Singaraja," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 2 (April 2023): 126–36.

pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan⁴.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam proses penelitian ini, akan dilaksanakan peninjauan dan evaluasi kritis dari sumber literatur yang ditemui. Proses literatur review ini berfokus pada tujuan untuk memahami dan dapat menggambarkan keadaan dari penelitian ter-update sesuai bidang yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini. Peneliti bertujuan untuk dapat menemukan pengetahuan terbaru, dapat mengidentifikasi kesenjangan pada penelitian, dan dapat menyusun dasar teoritis yang kuat untuk penelitian melalui literatur review. Adapun literatur yang peneliti gunakan ialah:

Tabel 1. Tinjauan Pustaka

No	Bentuk	Judul Penelitian	Penulis	Tahun
1	Jurnal	Program Pembinaan Kemandirian Pelatihan Kerja di Lapas Kelas 1 Makassar	Muh. Jefri	2021
2	Jurnal	Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung	Fauzi Rachman, Riki Zulfiko	2024
3	Jurnal	Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka	Ahmad Sanusi	2019
4	Jurnal	Evaluasi Program Pembinaan Kemandirian Bimker Pastar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar	Regina Ibrahim	2024
5	Jurnal	Optimalisasi Pembinaan Kemandirian Narapidana: Kunci Sukses dalam Tercapainya Tujuan Pemasyarakatan dan Reintegrasi Sosial	Winner Nur Amalia	2023
6	Jurnal	Evaluasi CSE-UCLA pada Studi Proses Pembelajaran Matematika	Siska Andriani	2015

⁴ Ahmad Zakki, Herman Nirwana, and Rezki Hariko, "The Effectiveness of Group Counseling Services in Enhancing Social Support for Wives of Drug Offenders in Correctional Facilities," *Bisma The Journal of Counseling* 8, no. 3 (2024), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/bisma/article/view/90818>.

7	Jurnal	Evaluasi CSE-UCLA pada Proses Pembelajaran Sosiologi sebagai Penguatan Karakter Peserta Didik	Risfaisal, M. Nur Akbar Rasyid, Sitti Mania, Hania	2024
8	Jurnal	Evaluasi Pemanfaatan E-Learning Menggunakan Model CSE-UCLA	Dewa Gede Hendra Divayana	2017
9	Jurnal	Implementasi Model CSE-UCLA dalam Penilaian Kinerja Guru	Nada Shofa Lubis, Nurul Anriani	2023
10	Jurnal	Studi Evaluatif Berbasis Model CSE-UCLA tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Bintara di Sekolah Polisi Negara Polda Bali	I Gede Putu Semadi, Nyoman Dantes, Ni Made Sri Mertasari	2019

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jefri (2021) dalam artikelnya *“Program Pembinaan Kemandirian Pelatihan Kerja di Lapas Kelas 1 Makassar”* bertujuan untuk mengetahui secara detail bagaimana program pembinaan kemandirian dilaksanakan dalam rangka membekali warga binaan dengan daya kerja sehingga dapat menjadi tenaga handal ketika kembali ke masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian industri garmen di Lapas Kelas 1 Makassar masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Kendati demikian, program ini memberikan dampak positif baik bagi narapidana, pihak lapas, maupun mitra kerja sama. Narapidana memperoleh upah yang lebih tinggi dibandingkan program pembinaan lainnya, pihak Lapas mendapat citra positif yang mendukung pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sementara CV Amura Pratama terbantu dalam penyelesaian produksi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang juga menyoroti pelaksanaan program pembinaan kemandirian sebagai bekal keterampilan bagi narapidana serta menggunakan subjek serupa, yaitu petugas lapas dan narapidana. Namun, perbedaan terlihat pada lokasi penelitian, metode yang digunakan karena tidak memakai evaluasi sebagaimana penelitian penulis serta fokus yang hanya tertuju pada satu program pembinaan.⁵

Selanjutnya, penelitian Fauzi Rachman (2024) berjudul *“Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung”* menganalisis efektivitas program pembinaan kemandirian dalam meningkatkan keterampilan narapidana, khususnya di bidang meubel, bengkel las, dan barbershop. Penelitian ini

⁵ Muh Jefri, “Program Pembinaan Kemandirian Pelatihan Kerja Di Lapas Kelas I Makassar,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 2 (2021): 128–37.

menunjukkan bahwa program pembinaan di Lapas Lubuk Basung berjalan baik melalui pelatihan selama 30 hari yang mencakup pembekalan materi hingga praktik langsung. Fokus penelitian ini serupa dengan kajian sebelumnya karena sama-sama membahas pelaksanaan program pembinaan kemandirian sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, metode yang digunakan yaitu hukum empiris, serta lingkup program yang mencakup lebih banyak bidang keterampilan.⁶

Kemudian, penelitian Sanusi (2019) dalam artikelnya *“Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka”* berfokus pada pelaksanaan pembinaan di Lapas Terbuka Kendal. Tujuan utamanya adalah memahami mekanisme pembinaan warga binaan dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perpindahan warga binaan ke Lapas Terbuka belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi, yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 serta Surat Edaran Dirjenpas No. PAS.PK.01.01.02-100 Tahun 2013. Kondisi ini menyebabkan perbandingan jumlah petugas dengan narapidana tidak ideal, yakni empat petugas hanya membina satu warga binaan. Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada kesamaan tujuan untuk menilai apakah pembinaan berjalan sesuai target, namun berbeda karena penelitian ini dilaksanakan di Lapas Terbuka dengan tantangan unik berupa sedikitnya jumlah narapidana yang mengurangi partisipasi pembinaan.⁷

Penelitian Ibrahim (2024) melalui artikelnya *“Evaluasi Program Pembinaan Kemandirian BIMKER Pastar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar”* bertujuan mengevaluasi efektivitas program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Bimker Pastar. Penelitian ini menemukan bahwa program berjalan cukup baik, dengan rekrutmen narapidana sesuai kebutuhan, petugas yang berkompeten, kerja sama dengan pihak ketiga, serta standar operasional yang diterapkan secara baik. Hasil evaluasi juga memperlihatkan peningkatan keterampilan dan produktivitas narapidana. Persamaan dengan penelitian lain terletak pada kesamaan fokus, yaitu mengevaluasi pembinaan sebagai sarana reintegrasi sosial narapidana. Namun, perbedaannya ada pada lingkup kajian yang hanya menyoroti satu program pembinaan serta perbedaan metode yang digunakan.⁸

⁶ Fauzi Rachman and Riki Zulfiko, “Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung,” *Yustisi* 11, no. 3 (2024): 378–87.

⁷ Ahmad Sanusi, “Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 123–38.

⁸ Ibrahim, “Evaluasi Program Pembinaan Kemandirian BIMKER Pastar Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Sementara itu, penelitian Amalia (2023) dalam tulisannya “*Optimalisasi Pembinaan Kemandirian Narapidana: Kunci Sukses dalam Tercapainya Tujuan Pemasyarakatan dan Reintegrasi Sosial*” menyoroti pentingnya pembinaan kemandirian dalam mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program pembinaan belum berjalan optimal, yang terlihat dari masih tingginya stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Amalia menekankan perlunya edukasi publik agar masyarakat lebih terbuka dalam menerima mereka sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal mengevaluasi pembinaan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Namun, perbedaan terlihat pada lingkup kajian yang tidak berfokus pada satu UPT saja, serta tidak adanya observasi mendalam di unit pemasyarakatan.

Berikutnya, penelitian Andriani (2015) berjudul “*Evaluasi CSE-UCLA pada Proses Pembelajaran Matematika*” menggunakan model evaluasi CSE-UCLA untuk menggambarkan implementasi standar proses pembelajaran di SMP Negeri Satu Atap Lerep. Penelitian ini menemukan bahwa pembelajaran matematika sudah mengikuti standar proses yang ideal meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama menggunakan model evaluasi CSE-UCLA. Namun, objek penelitiannya berbeda karena Andriani berfokus pada pembelajaran matematika, bukan pemasyarakatan.⁹

Kemudian, penelitian Risfaisal dkk. (2024) dalam artikelnya “*Evaluasi CSE-UCLA pada Studi Proses Pembelajaran Sosiologi sebagai Penguatan Karakter Peserta Didik*” juga menerapkan model CSE-UCLA. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketercapaian standar pembelajaran sosiologi di SMA 1 Unismuh Makassar serta mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan. Hasilnya memberikan rekomendasi agar evaluasi dilakukan secara berkelanjutan serta perlunya pengembangan profesional bagi guru. Persamaan dengan penelitian penulis ialah penggunaan model evaluasi CSE-UCLA untuk menggali faktor penghambat dan rekomendasi perbaikan, namun berbeda dari segi objek penelitian yang berfokus pada pembelajaran sosiologi.¹⁰

Blitar.”

⁹ Siska Andriani, “Evaluasi CSE-UCLA Pada Studi Proses Pembelajaran Matematika,” *Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika* 6, no. 2 (2015): 167–76.

¹⁰ Risfaisal Risfaisal et al., “Evaluasi CSE-UCLA Pada Studi Proses Pembelajaran Sosiologi Sebagai Penguatan Karakter Peserta Didik,” *Jurnal Kependidikan Media* 13, no. 1 (2024): 95–104.

Selanjutnya, penelitian Divayana (2017) dalam artikelnya *“Evaluasi Pemanfaatan E-Learning Menggunakan Model CSE-UCLA”* bertujuan menilai sejauh mana sistem E-Learning memenuhi standar, sekaligus mengungkap faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun E-Learning bermanfaat signifikan, masih diperlukan peningkatan berupa pelatihan komprehensif, infrastruktur teknologi yang lebih kuat, dan alokasi anggaran yang memadai. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan model evaluasi CSE-UCLA, sementara perbedaannya ada pada objek penelitian yang berfokus pada pemanfaatan teknologi pembelajaran daring.¹¹

Penelitian Lubis dan Anriani (2023) dalam artikelnya *“Implementasi Model CSE-UCLA dalam Penilaian Kinerja Guru”* menilai efektivitas model ini untuk mengevaluasi kinerja guru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa CSE-UCLA mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap kualitas pengajaran serta rekomendasi perbaikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan metode evaluasi, namun perbedaannya tampak pada objek penelitian yaitu kinerja guru serta perbedaan penggunaan dimensi dalam model evaluasi, yakni lima dimensi dibandingkan empat yang digunakan penulis.¹²

Terakhir, penelitian Putu Semadi dkk. (2019) dalam artikelnya *“Studi Evaluatif Berbasis Model CSE-UCLA tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Bintara di Sekolah Polisi Negara POLDA Bali”* menggunakan model evaluasi CSE-UCLA untuk menilai kualitas program pendidikan Bintara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berjalan dengan baik meskipun terdapat kendala dalam optimalisasi sumber daya manusia dan dukungan kebijakan. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan model evaluasi CSE-UCLA dengan empat dimensi, sementara perbedaannya ada pada objek penelitian yang berfokus pada pendidikan kepolisian dan tidak berkaitan dengan masyarakat.¹³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pendekatan induktif. Dalam penelitian ini,

¹¹ Dewa Gede Hendra Divayana, “Evaluasi Pemanfaatan E-Learning Menggunakan Model CSE-UCLA,” *Cakrawala Pendidikan*, no. 2 (2017): 87122.

¹² Nada Shofa Lubis and Nurul Anriani, “Implementasi Model Center for the Study of Evaluation-University of California in Los Angeles (CSE-UCLA) Dalam Penilaian Kinerja Guru,” *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 2 (2023): 860–66.

¹³ I. Gede Putu Semadi, Nyoman Dantes, and Ni Made Sri Mertasari, “Studi Evaluatif Berbasis Model Cse-Ucla Tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Bintara Di Sekolah Polisi Negara Polda Bali,” *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2019): 89–105.

peneliti terlibat langsung dalam konteks yang diteliti, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih akurat tentang pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Muara Enim. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, serta studi literatur yang relevan. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan yang dianggap paling sesuai dengan fokus penelitian, seperti Kalapas, petugas bimbingan, dan narapidana yang terlibat dalam program pembinaan.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif untuk menggali pengalaman hidup narapidana dan pihak Lapas dalam menjalani program pembinaan kemandirian. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen pendukung seperti laporan kegiatan dan peraturan yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan termasuk observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data dengan mengombinasikan berbagai teknik pengumpulan informasi. Hasil penelitian akan dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan untuk mendapatkan temuan yang komprehensif¹⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Evaluasi CSE-UCLA Pada Program Pembinaan Kemandirian Dalam Kesiapan Hidup Bermasyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim

Evaluasi program pembinaan kemandirian narapidana merupakan instrumen penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan narapidana harus diselenggarakan secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan guna membentuk narapidana yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dalam konteks ini, evaluasi menjadi krusial untuk memastikan bahwa program pembinaan tidak sekadar formalitas, tetapi mampu menumbuhkan kemandirian warga binaan, baik secara ekonomi maupun sosial. Lapas Kelas IIB Muara Enim merupakan salah satu lembaga yang telah mengembangkan beragam program pembinaan kemandirian, seperti *bakery*, menjahit, membatik, barbershop, dan pertukangan kayu.

¹⁴ Rahmatullah, Yulianti, and Mangku, "Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lapas Kelas Ii B Singaraja."

Program-program tersebut perlu dianalisis secara komprehensif untuk menilai relevansi, efisiensi, serta dampaknya terhadap kesiapan hidup bermasyarakat pasca-pembebasan¹⁵.

Salah satu pendekatan evaluatif yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah model *CSE-UCLA* yang dikembangkan oleh Alkin (1970), yang mencakup empat dimensi utama: *need assessment*, *program planning*, *formative evaluation*, dan *summative evaluation*. Model ini menekankan pentingnya evaluasi yang berlangsung sejak tahap awal perencanaan hingga tahap akhir pelaksanaan program. *Need assessment* digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan ideal; *program planning* berfungsi sebagai tahap perencanaan strategis yang dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut; *formative evaluation* membantu mengarahkan perbaikan saat program berjalan; dan *summative evaluation* mengevaluasi hasil akhir dan keberlanjutan program. Model ini dipilih karena bersifat holistik dan dinilai mampu menjawab kompleksitas konteks pembinaan di lapas. Sebagaimana disampaikan oleh Sudrajat (2020), model evaluasi *CSE- UCLA* efektif untuk menganalisis implementasi kebijakan pembinaan yang tidak hanya mengedepankan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan karakter dan sikap kerja.

Selain itu, evaluasi pembinaan berbasis *CSE-UCLA* juga memungkinkan penguatan dari sisi manajemen program, pelibatan stakeholder, dan pemetaan potensi keberlanjutan. Hapsari (2021), menekankan bahwa keberhasilan pembinaan narapidana sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana, serta hubungan kemitraan dengan lembaga eksternal seperti dunia usaha dan industri. Di Lapas Kelas IIB Muara Enim, beragam program pembinaan memiliki karakteristik, tantangan, dan peluang yang berbeda. Oleh karena itu, evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji program secara spesifik berdasarkan dimensinya masing-masing, guna memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terkait keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi. Dengan evaluasi yang sistematis dan berorientasi pada peningkatan kualitas, program pembinaan diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas lembaga, melainkan menjadi wadah transformasi sosial yang bermakna bagi warga binaan.

1. *Need Assesment*

Dalam model evaluasi *CSE-UCLA*, *need assessment* merupakan tahap awal yang

¹⁵ Nina Permata Sari et al., *Pengembangan Model Evaluasi CIPP Untuk Program Bimbingan Dan Konseling Pada Kurikulum Merdeka Tingkat SMK Di Wilayah Lahan Basah*, Universitas Lambung Mangkurat, 2023, <https://repo-dosen.ulm.ac.id/handle/123456789/33432>.

berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal dari sebuah program. Kaufman & English (1979) menyatakan bahwa *need* adalah selisih antara “what is” dan “what should be”, yang menjadi dasar penentuan prioritas intervensi. Dalam konteks program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Muara Enim, need assessment dilakukan untuk memahami kebutuhan warga binaan terhadap keterampilan yang relevan guna mendukung reintegrasi sosial. Setiap unit pelatihan seperti bakery, menjahit, membatik, barbershop, dan pertukangan kayu menunjukkan adanya kebutuhan spesifik, baik dari sisi peserta, sarana, maupun pelatihan teknis. Dengan menganalisis kebutuhan tersebut, pembinaan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran, relevan, dan berkelanjutan.

Tabel 2. Tahap Need Assesmmment Pada Evaluasi Program Pembinaan Kemandirian

Program	Masalah yang Ditemui
Bakery	Program bakery belum memiliki peta potensi dan minat warga binaan secara menyeluruh. Rekrutmen terbatas tanpa mekanisme seleksi yang terstruktur, dan belum ada pelatihan lanjutan. Tidak tersedia peta jalan program atau kemitraan eksternal, sehingga menghambat kesinambungan dan pengembangan produksi.
Menjahit	Program menjahit belum memiliki sistem rekrutmen berbasis minat dan keterampilan awal warga binaan. Peserta terbatas dan tidak semua warga binaan memiliki akses atau motivasi untuk ikut serta. Belum tersedia penyuluhan atau pelatihan dasar secara berkala untuk menarik minat baru. Tidak ada peta potensi atau strategi pengembangan kapasitas jangka panjang.
Membatik	Program membatik belum dilengkapi peta potensi warga binaan yang memiliki minat atau bakat seni. Peserta terbatas dan tidak ada mekanisme perekrutan yang terbuka atau terstruktur. Belum tersedia pelatihan dasar dari tenaga ahli luar yang dapat meningkatkan variasi motif dan teknik. Ketiadaan strategi pelestarian dan perluasan program membuat keberlanjutan bergantung pada kemampuan individu peserta saat ini.
Barbershop	Program barbershop belum memiliki pemetaan minat dan keterampilan warga binaan secara menyeluruh. Jumlah peserta terbatas dan belum ada pelatihan teknis dari tenaga profesional. Seleksi belum berbasis kualifikasi, hanya mengandalkan

	pengalaman awal. Tidak ada perencanaan pengembangan atau kemitraan eksternal yang mendukung peningkatan kualitas layanan.
Pertukangan Kayu	Program pertukangan kayu belum memiliki peta minat dan keterampilan warga binaan secara sistematis. Peserta terbatas dan belum tersedia pelatihan lanjutan yang mendukung peningkatan kualitas kerja. Ketersediaan bahan baku tidak konsisten, sehingga menghambat produktivitas. Belum ada perencanaan pengembangan jangka panjang maupun kemitraan eksternal untuk mendukung keberlanjutan program.

1) Bakery

Program pelatihan bakery di Lapas Kelas IIB Muara Enim merupakan bentuk pembinaan yang ditujukan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan tata boga sebagai bekal kemandirian pasca menjalani masa pidana. Pihak lapas telah menyediakan sarana seperti oven, mixer, meja kerja, dan bahan-bahan produksi dasar, serta memberikan ruang bagi warga binaan untuk memproduksi dan menjual hasil olahan mereka. Program ini mampu melatih kedisiplinan, kerja sama, dan tanggung jawab. Namun, dari sisi kebutuhan, belum terdapat pemetaan potensi dan minat warga binaan secara menyeluruh yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pelatihan. Jumlah peserta masih terbatas dan tidak disertai dengan sistem pelatihan berkelanjutan. Selain itu, belum ada kemitraan dengan lembaga pelatihan atau industri makanan yang dapat meningkatkan kualitas produk dan membuka akses pemasaran yang lebih luas¹⁶.

2) Menjahit

Program pelatihan menjahit di Lapas Kelas IIB Muara Enim merupakan salah satu bentuk pembinaan keterampilan yang bertujuan mendukung kemandirian ekonomi warga binaan melalui penguasaan teknik menjahit dasar hingga pembuatan produk sederhana. Lapas telah menyediakan mesin jahit, perlengkapan menjahit, dan ruang kerja yang memadai sebagai fasilitas pendukung. Program ini dinilai mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerapian, dan ketekunan dalam bekerja. Namun, belum terdapat pemetaan minat dan keterampilan menjahit warga binaan secara menyeluruh, sehingga proses rekrutmen belum berbasis potensi yang terukur. Pelatihan juga belum berjalan

¹⁶ Zakki, Nirwana, and Hariko, "The Effectiveness of Group Counseling Services in Enhancing Social Support for Wives of Drug Offenders in Correctional Facilities."

secara berkelanjutan dan belum ada modul pembelajaran atau pendampingan teknis dari pihak eksternal. Ketiadaan rencana pengembangan program dan kemitraan dengan lembaga pelatihan keterampilan menjahit menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas dan kesinambungan pelatihan.

3) Membatik

Program membatik di Lapas Kelas IIB Muara Enim merupakan salah satu bentuk pembinaan kemandirian berbasis keterampilan seni yang bertujuan membekali warga binaan dengan kemampuan membatik secara manual. Pihak lapas telah menyediakan fasilitas dasar seperti kain mori, canting, kompor listrik, pewarna, dan alat pelindung diri, serta memberikan ruang bagi warga binaan untuk berkreasi. Program ini memberi dampak positif dalam membangun ketelitian, kesabaran, dan kepercayaan diri. Namun, program ini belum dilengkapi dengan pemetaan minat dan bakat seni warga binaan secara menyeluruh, sehingga rekrutmen peserta masih terbatas dan tidak berbasis data. Belum tersedia pelatihan dari tenaga ahli batik profesional maupun rencana jangka panjang untuk pengembangan motif dan teknik. Ketiadaan kerja sama dengan lembaga seni atau pemasaran batik juga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program.

4) Barbershop

Program pelatihan Barbershop di Lapas Kelas IIB Muara Enim merupakan salah satu bentuk pembinaan yang diarahkan pada penguatan keterampilan jasa dan kemandirian ekonomi warga binaan. Dalam pelaksanaannya, pihak lapas telah menyediakan fasilitas dasar seperti kursi cukur, alat potong rambut, serta ruangan pelayanan, dan memberi kepercayaan kepada warga binaan untuk mengelola layanan secara mandiri. Program ini efektif dalam membangun tanggung jawab, etos kerja, serta rasa percaya diri peserta. Namun, dari sisi kebutuhan, belum dilakukan pemetaan minat dan potensi keterampilan warga binaan secara menyeluruh, sehingga perekrutan peserta masih terbatas dan tidak berbasis sistem. Ketiadaan dokumen rencana pelatihan jangka panjang, belum adanya pelatihan teknis dari tenaga profesional, dan belum terbangunnya kerja sama dengan lembaga pelatihan kejuruan menjadi hambatan dalam penguatan dan keberlanjutan program ini.

5) Pertukangan Kayu

Program pertukangan kayu di Lapas Kelas IIB Muara Enim merupakan bagian dari

pembinaan kemandirian yang diarahkan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan kerja praktis dan aplikatif di bidang pertukangan. Lapas telah menyediakan peralatan dasar seperti gergaji, mesin serut, palu, paku, dan meja kerja untuk mendukung proses pelatihan. Kegiatan ini melatih ketelitian, ketekunan, serta kemampuan teknis warga binaan dalam memproduksi barang sesuai kebutuhan. Namun, hingga saat ini belum tersedia pemetaan potensi dan minat warga binaan dalam bidang pertukangan secara menyeluruh. Jumlah peserta masih terbatas dan belum ada pelatihan lanjutan dari tenaga ahli profesional¹⁷.

2. *Program Planning*

Dalam model evaluasi CSE-UCLA, program planning merupakan tahap perencanaan strategis yang disusun berdasarkan hasil need assessment, dengan tujuan menyusun desain program yang efektif dan relevan terhadap kebutuhan sasaran. Stufflebeam (2003) menyatakan bahwa perencanaan program harus memperhatikan konteks, input, proses, dan hasil yang diharapkan agar implementasinya berjalan optimal dan berorientasi pada perubahan yang terukur. Dalam konteks program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Muara Enim, tahap perencanaan mencakup penyusunan kurikulum pelatihan, penjadwalan kegiatan, pengadaan peralatan, serta penentuan kriteria rekrutmen warga binaan. Setiap unit keterampilan baik bakery, menjahit, membatik, barbershop, maupun pertukangan kayu memerlukan rencana pengembangan yang mencakup pelatihan teknis lanjutan, pembinaan karakter kerja, dan perluasan jaringan mitra eksternal. Tanpa program planning yang jelas dan terukur, pembinaan berisiko berjalan stagnan dan tidak berdampak jangka panjang. Perencanaan yang adaptif dan berbasis kebutuhan lapangan menjadi fondasi penting dalam menciptakan program pembinaan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi proses reintegrasi sosial warga binaan.

Tabel 3. Tahap Program Planning Pada Evaluasi Program Pembinaan Kemandirian

Program	Rencana Pengembangan yang Dibutuhkan
Bakery	Program bakery memerlukan perencanaan yang mencakup penyusunan kurikulum pelatihan yang

¹⁷ Almuqtadir Pasya and Padmono Wibowo, "Analisis Peran Serta Teknologi Dalam Inovasi Pelayanan Publik Kepada Narapidana Di Era Disrupsi Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Enim," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 462–68.

	berkelanjutan, mekanisme rekrutmen berbasis minat dan potensi, serta penguatan kapasitas teknis warga binaan. Diperlukan juga peta jalan pengembangan program dan kemitraan dengan pihak eksternal guna mendukung pemasaran dan peningkatan kualitas produk. Tanpa perencanaan yang terstruktur, program berisiko tidak berkembang secara optimal.
Menjahit	Program menjahit membutuhkan perencanaan yang meliputi sistem rekrutmen berbasis keterampilan, modul pelatihan bertahap, serta pembinaan lanjutan untuk meningkatkan kualitas hasil jahitan. Ketiadaan rencana pengembangan jangka panjang dan kemitraan dengan lembaga pelatihan menjahit menjadi hambatan utama. Diperlukan strategi perencanaan yang sistematis agar program berjalan berkelanjutan dan lebih berdampak.
Membatik	Program membatik memerlukan perencanaan yang mencakup seleksi peserta berdasarkan minat dan bakat seni, kurikulum pelatihan dari tenaga ahli, serta pengembangan teknik dan motif. Saat ini belum ada roadmap program maupun kerja sama dengan lembaga seni yang mendukung peningkatan kualitas. Perencanaan yang matang dibutuhkan agar program tidak hanya bersifat simbolis, tetapi berkelanjutan dan bernilai ekonomi.
Barbershop	Program barbershop membutuhkan perencanaan yang meliputi pemetaan keterampilan warga binaan, pelatihan teknis dari instruktur profesional, serta manajemen jadwal layanan agar operasional lebih efisien. Belum adanya sistem seleksi yang terstruktur dan rencana pengembangan jangka panjang membuat program sulit berkembang. Perlu disusun strategi perencanaan yang terukur untuk menjamin kualitas layanan dan kesinambungan pembinaan.
Pertukangan Kayu	Program pertukangan kayu memerlukan perencanaan yang mencakup pengadaan bahan baku secara berkelanjutan, pelatihan teknis lanjutan, serta pemetaan minat dan keterampilan warga binaan. Saat ini belum tersedia mekanisme seleksi peserta, peta jalan program, maupun kemitraan eksternal yang mendukung

	peningkatan produksi. Tanpa perencanaan yang sistematis, program sulit berkembang secara optimal dan bersaing di pasar.
--	---

1) Bakery

Program perencanaan pembinaan bakery di Lapas Kelas IIB Muara Enim seharusnya disusun secara sistematis berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan warga binaan. Perencanaan ini meliputi penyusunan kurikulum pelatihan yang bertahap dan berkelanjutan, pemetaan minat serta potensi warga binaan di bidang tata boga, serta pengembangan metode seleksi peserta yang objektif dan transparan. Selain itu, perlu dibangun peta jalan program yang mencakup target produksi, pengembangan produk, serta integrasi pelatihan kewirausahaan. Dalam konteks kelembagaan, program juga perlu dirancang untuk menjalin kemitraan dengan pihak eksternal seperti lembaga pelatihan kuliner, UMKM, atau industri makanan, guna memberikan pelatihan lanjutan dan membuka akses pemasaran yang lebih luas. Dengan perencanaan yang matang, program bakery tidak hanya menjadi sarana pelatihan teknis, tetapi juga motor penggerak pembinaan ekonomi warga binaan yang berkelanjutan dan produktif¹⁸.

2) Menjahit

Program perencanaan pembinaan menjahit di Lapas Kelas IIB Muara Enim perlu disusun dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, berlandaskan pada identifikasi kebutuhan serta potensi keterampilan warga binaan. Rencana program harus mencakup kurikulum pelatihan teknis yang terstruktur, mulai dari keterampilan dasar hingga teknik lanjutan, serta disertai dengan modul pembinaan soft skills seperti kedisiplinan, ketelitian, dan manajemen produksi. Diperlukan juga sistem rekrutmen peserta berbasis minat dan latar belakang keterampilan warga binaan yang dapat ditelusuri melalui asesmen awal. Selain itu, belum adanya peta jalan program dan kemitraan dengan lembaga pelatihan menjahit eksternal menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan pelatihan. Perencanaan program yang baik harus mencakup target produksi, strategi pemasaran hasil karya, serta kemungkinan sertifikasi keterampilan untuk mendukung reintegrasi sosial warga binaan selesai menjalani masa

¹⁸ Raras Feby Rhamayanti, "Evaluasi Program Ekstrakurikuler Di SMP Negeri 1 Legok Kabupaten Tangerang" (B.S. thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

pidana.

3) Membatik

Perencanaan program pembinaan membatik di Lapas Kelas IIB Muara Enim perlu dirancang secara terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Program ini harus diawali dengan pemetaan minat dan bakat seni warga binaan sebagai dasar dalam seleksi peserta yang lebih tepat sasaran. Kurikulum pelatihan sebaiknya dikembangkan dalam tahapan yang sistematis, mulai dari teknik dasar hingga pengembangan motif khas, serta dilengkapi dengan pelatihan manajemen produksi dan pemasaran. Saat ini, belum tersedia roadmap program maupun kerja sama dengan lembaga seni batik atau pelaku industri kreatif yang dapat memperkuat aspek teknis dan nilai jual produk. Oleh karena itu, perencanaan perlu mencakup pengembangan jejaring eksternal, pelibatan instruktur profesional, serta strategi promosi yang memadai agar hasil karya warga binaan memiliki daya saing.

4) Barbershop

Perencanaan program pembinaan barbershop di Lapas Kelas IIB Muara Enim perlu dikembangkan secara menyeluruh untuk menjawab tantangan teknis dan operasional yang ada. Tahap awal perencanaan sebaiknya dimulai dengan pemetaan keterampilan dasar dan minat warga binaan terhadap jasa potong rambut, yang kemudian dijadikan dasar dalam proses seleksi peserta pelatihan. Kurikulum pelatihan perlu disusun bertahap, mencakup teknik dasar dan lanjutan dalam barbering, pelayanan pelanggan, hingga kebersihan dan keamanan kerja. Saat ini, belum terdapat sistem pelatihan berkelanjutan atau kemitraan dengan lembaga pelatihan kecantikan profesional, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan membuka peluang sertifikasi. Selain itu, perlu disusun strategi manajemen operasional seperti pembagian jadwal kerja, optimalisasi ruang yang terbatas, dan penyesuaian kapasitas layanan agar peserta tidak mengalami kelelahan akibat antrian yang panjang.

5) Pertukangan Kayu

Perencanaan program pembinaan pertukangan kayu di Lapas Kelas IIB Muara Enim perlu disusun secara strategis dan berbasis kebutuhan riil lapangan. Program ini harus diawali dengan pemetaan potensi dan minat warga binaan di bidang pertukangan, yang dapat menjadi dasar seleksi peserta secara objektif. Kurikulum pelatihan perlu mencakup teknik dasar hingga lanjutan dalam pengolahan kayu, penggunaan alat, desain furnitur

sederhana, serta pelatihan keselamatan kerja. Saat ini, program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan bahan baku dan belum adanya kerja sama dengan pihak eksternal, baik dari sektor industri kayu maupun lembaga pelatihan kejuruan. Selain itu, belum tersedia roadmap program jangka panjang, termasuk rencana pengembangan produksi atau strategi pemasaran hasil kerja. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan komprehensif yang mencakup pengadaan bahan secara berkelanjutan, peningkatan kualitas pelatihan melalui pelibatan tenaga ahli, serta penciptaan jalur distribusi produk untuk memperkuat aspek ekonomi program¹⁹.

3. *Formative Evaluation*

Dalam model evaluasi CSE-UCLA, formative evaluation merupakan tahap evaluasi yang dilakukan selama proses pelaksanaan program, bertujuan untuk memberikan umpan balik yang bersifat korektif dan penguatan agar program berjalan secara efektif dan sesuai rencana. Menurut Worthen, Sanders, dan Fitzpatrick (2004), evaluasi formatif berfungsi untuk mendeteksi permasalahan dalam implementasi program sejak dini serta memberikan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses pelaksanaan. Dalam konteks program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Muara Enim, evaluasi formatif melibatkan pemantauan terhadap keaktifan peserta, kelancaran teknis pelatihan, efektivitas instruktur atau pendamping, serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Setiap unit keterampilan seperti bakery, menjahit, membatik, barbershop, dan pertukangan kayu perlu dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul di lapangan, seperti ketidaksesuaian jadwal, keterbatasan alat, atau ketidakseimbangan jumlah peserta dan kapasitas pelatihan. Melalui evaluasi formatif, pihak pelaksana dapat menyesuaikan strategi, memperbaiki metode, dan menyesuaikan kebijakan agar pelaksanaan pembinaan tetap relevan, efisien, dan berdampak nyata bagi kesiapan warga binaan dalam proses reintegrasi sosial. Evaluasi ini berfungsi sebagai alat navigasi yang menjaga arah pelaksanaan program tetap pada jalurnya.

¹⁹ Rahmatullah, Yulianti, and Mangku, "Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lapas Kelas Ii B Singaraja."

Tabel 4. Tahap Formmative Evaluation Pada Evaluasi Program Pembinaan Kemandirian

Program	Masalah yang Ditemui dan Evaluasi Formatif
Bakery	Program bakery di Lapas Kelas IIB Muara Enim telah menunjukkan kemajuan, namun terdapat kendala, seperti keterbatasan peralatan, pengawasan kebersihan dan kualitas produk yang belum konsisten, serta belum adanya sistem monitoring yang terstruktur. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan keterampilan warga binaan berkembang dan program berjalan optimal.
Menjahit	Program menjahit memiliki kontribusi positif, namun terbatasnya peserta memperlambat produksi, dan belum ada evaluasi berkelanjutan untuk memantau perkembangan keterampilan. Peralatan mesin jahit yang terbatas juga menghambat variasi model dan pelatihan lanjutan. Tanpa evaluasi berkala dan umpan balik terstruktur, program berisiko stagnan.
Membatik	Program membatik memiliki nilai seni dan edukatif, namun terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, seperti proses produksi yang memakan waktu lama, jumlah peserta terbatas, serta tidak ada evaluasi keterampilan yang terstruktur. Tanpa pelatihan intensif dari instruktur profesional luar dan sistem dokumentasi, program ini sulit berkembang secara maksimal dan berkelanjutan.
Barbershop	Program barbershop berjalan aktif, namun hambatan seperti ruang kerja sempit, antrean panjang, dan belum adanya sistem evaluasi teknis yang terstandar mengurangi efektivitas program. Pengawasan masih bersifat umum tanpa laporan tertulis atau asesmen keterampilan. Tanpa monitoring rutin dan perbaikan, program berisiko kehilangan kualitas pelayanan.
Pertukangan Kayu	Program pertukangan kayu menghadapi kendala teknis dan struktural, seperti keterbatasan bahan baku dan tidak adanya sistem penilaian berkala terhadap hasil kerja. Pengawasan informal dan kurangnya pelatihan lanjutan atau variasi desain produk membuat pencapaian pembelajaran sulit diukur dan menghambat daya saing hasil karya.

1) Bakery

Evaluasi formatif terhadap program pembinaan bakery di Lapas Kelas IIB Muara Enim menunjukkan bahwa meskipun kegiatan telah berjalan dan memberikan manfaat langsung, terdapat sejumlah aspek pelaksanaan yang masih perlu diperbaiki. Dari segi

teknis, belum terdapat sistem evaluasi berkala untuk menilai peningkatan keterampilan warga binaan, baik secara individu maupun kolektif. Pengawasan kegiatan harian masih bersifat umum dan belum didukung oleh format penilaian terstruktur, sehingga perkembangan peserta tidak terdokumentasi dengan baik. Selain itu, distribusi tugas dan pembagian peran dalam produksi masih belum merata, menyebabkan beberapa peserta kurang aktif dalam proses pembelajaran. Dalam hal manajemen, belum tersedia mekanisme pelaporan yang sistematis terkait volume produksi, kualitas produk, dan kendala operasional yang dihadapi. Pelatihan juga belum mencakup aspek kewirausahaan secara mendalam, sehingga orientasi bisnis dari hasil produksi masih sangat terbatas. Kurangnya pelibatan instruktur profesional dari luar dan belum adanya sistem umpan balik dari konsumen turut menghambat proses penyempurnaan produk²⁰.

2) Menjahit

Evaluasi formatif terhadap program pembinaan menjahit di Lapas Kelas IIB Muara Enim menunjukkan bahwa program ini telah berjalan dengan arah yang positif, namun masih menghadapi beberapa kendala yang signifikan dalam proses pelaksanaannya. Dari segi teknis, belum tersedia sistem evaluasi terstandar untuk mengukur perkembangan keterampilan menjahit setiap peserta secara berkala. Kegiatan pelatihan masih bersifat umum dan belum dibedakan berdasarkan tingkat kemampuan peserta, sehingga proses pembelajaran belum sepenuhnya optimal. Selain itu, belum ada modul atau kurikulum yang sistematis yang dapat dijadikan acuan dalam proses pelatihan, membuat keterampilan yang didapat cenderung bergantung pada pengalaman awal warga binaan itu sendiri. Dalam praktiknya, peralatan menjahit masih terbatas, sehingga penggunaan mesin harus dilakukan secara bergantian, yang berpengaruh terhadap efektivitas waktu latihan. Manajemen program juga belum memiliki sistem monitoring dan pelaporan terstruktur, sehingga sulit untuk memetakan capaian pembelajaran dan permasalahan di lapangan. Belum terjalin kerja sama dengan lembaga vokasi atau pelatihan eksternal yang dapat memperkuat aspek teknis maupun membuka peluang pemasaran produk.

3) Membatik

Evaluasi formatif terhadap program pembinaan membatik di Lapas Kelas IIB Muara

²⁰ Desi Sianipar, Wellem Sairwona, and Esti Regina Boiliu, "Evaluasi Program Sekolah Minggu Dengan Menggunakan Model Evaluasi CSE-UCLA," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 2 (2023): 522–40.

Enim mengindikasikan bahwa meskipun program ini memberikan ruang ekspresi seni dan pelatihan keterampilan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Salah satu kendala utama terletak pada minimnya jumlah peserta aktif, yang hanya terdiri dari tiga warga binaan, sehingga distribusi tugas dan keberlangsungan produksi sangat terbatas. Proses evaluasi keterampilan belum berjalan secara sistematis karena tidak adanya standar penilaian atau rubrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemajuan teknis dan artistik peserta. Kurikulum pelatihan belum tersedia dalam bentuk modul baku, dan kegiatan masih sangat bergantung pada kemampuan awal warga binaan serta pembinaan mandiri dari petugas internal. Selain itu, program belum memiliki sistem pencatatan dokumentatif atas capaian hasil batik yang telah diproduksi maupun kendala teknis yang dihadapi dalam proses membatik. Fasilitas pelatihan dinilai cukup memadai untuk pelaksanaan dasar, namun belum ada rotasi atau variasi teknik yang diterapkan untuk memperluas keterampilan peserta. Belum ada pelatihan lanjutan oleh instruktur profesional dari luar maupun kerja sama dengan komunitas batik atau lembaga seni, sehingga variasi motif dan teknik masih terbatas. Hal ini menyebabkan hasil produksi belum siap untuk bersaing secara komersial.

4) Barbershop

Evaluasi formatif terhadap program pembinaan Barbershop di Lapas Kelas IIB Muara Enim menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi besar dalam membentuk keterampilan jasa layanan dan membuka peluang ekonomi bagi warga binaan. Program ini sudah berjalan cukup rutin, namun masih menghadapi beberapa hambatan teknis dan manajerial dalam proses pelaksanaannya. Hingga saat ini, belum tersedia modul pelatihan yang baku dan berjenjang untuk mengukur kompetensi peserta secara bertahap. Pelatihan hanya berlangsung secara praktik langsung tanpa struktur kurikulum atau standar evaluasi keterampilan. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti jumlah kursi cukur dan alat potong rambut membatasi efektivitas kerja dan menimbulkan antrean panjang yang berisiko menurunkan produktivitas serta motivasi peserta. Monitoring terhadap hasil potongan, ketepatan waktu pelayanan, dan kepuasan pelanggan internal belum terdokumentasi secara sistematis. Dari sisi manajemen, program belum dilengkapi sistem pelaporan berkala yang mencatat progres keterampilan maupun kendala teknis harian. Belum ada pelatihan lanjutan oleh tenaga profesional dari luar lapas atau kerja sama dengan lembaga pelatihan kecantikan yang dapat memperkuat kapasitas teknis

peserta. Tanpa sistem evaluasi proses yang terstruktur, potensi pembinaan dalam Barbershop berisiko tidak berkembang maksimal.

5) Pertukangan Kayu

Evaluasi formatif terhadap program pembinaan pertukangan kayu di Lapas Kelas IIB Muara Enim menunjukkan bahwa meskipun program ini telah memberikan pelatihan dasar kepada warga binaan, pelaksanaannya masih belum terstruktur dengan baik. Kurikulum pelatihan belum tersedia secara sistematis, sehingga kegiatan cenderung berjalan tanpa panduan pembelajaran yang terarah dan terukur. Keterbatasan bahan baku berupa kayu serta alat kerja yang masih konvensional menghambat variasi dan kualitas hasil produksi. Selain itu, belum ada evaluasi berkala terhadap keterampilan warga binaan maupun dokumentasi hasil kerja yang bisa menjadi dasar peningkatan program. Tidak adanya keterlibatan instruktur profesional maupun kemitraan dengan pihak eksternal juga menjadi kendala dalam penguatan kapasitas teknis peserta. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan pada sistem pelatihan, evaluasi proses, serta dukungan sumber daya agar program ini dapat memberikan dampak jangka panjang dalam pembinaan kemandirian warga binaan.

4. *Summative Evaluation*

Dalam model evaluasi CSE-UCLA, summative evaluation merupakan tahap akhir evaluasi yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan dampak dari pelaksanaan program secara keseluruhan. Stufflebeam (2003) menyebut bahwa summative evaluation digunakan untuk memberikan pertimbangan terhadap keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan kelanjutan atau penghentian program. Dalam konteks program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Muara Enim, evaluasi ini berfokus pada sejauh mana kegiatan pelatihan seperti bakery, menjahit, membatik, barbershop, dan pertukangan kayu telah memberikan manfaat nyata bagi warga binaan, baik dari aspek keterampilan teknis, pembentukan karakter, hingga kesiapan untuk reintegrasi sosial. Melalui evaluasi ini, efektivitas pembinaan diukur berdasarkan perubahan perilaku, kemandirian ekonomi, serta potensi warga binaan dalam menjalani kehidupan pasca-pemasyarakatan.

Tabel 5. Tahap Program Planning Pada Evaluasi Program Pembinaan Kemandirian

Program	Evaluasi Sumatif dan Dampak
Bakery	Program bakery di Lapas Kelas IIB Muara Enim memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan dan kesiapan warga binaan. Pelatihan ini berhasil membentuk etos kerja, kedisiplinan, dan kemandirian pada peserta. Produk yang dihasilkan telah dikenal di lingkungan sekitar, meskipun skala pemasarannya masih terbatas. Namun, belum ada data kuantitatif yang menunjukkan dampak terhadap pengurangan residivisme atau peningkatan ekonomi pascabebas. Keberlanjutan program masih bergantung pada dukungan internal dan belum ada kemitraan dengan industri kuliner luar lapas.
Menjahit	Program menjahit berhasil membekali warga binaan dengan keterampilan teknis aplikatif. Program ini menciptakan produk pakaian dan seragam lapas yang digunakan secara internal. Keterampilan menjahit meningkatkan kepercayaan diri dan kesiapan menghadapi kehidupan pasca-pidana. Namun, karena belum ada sistem pelacakan alumni dan evaluasi jangka panjang, dampak riil terhadap reintegrasi sosial belum dapat diukur. Diperlukan pengembangan sistem monitoring dan kerja sama dengan pihak eksternal untuk memperluas manfaat program.
Membatik	Program membatik memberikan kontribusi positif dalam membentuk karakter dan keterampilan seni. Kegiatan ini berhasil menjadi media ekspresi dan terapi psikologis serta menghasilkan karya batik yang bernilai seni tinggi. Namun, program ini masih terbatas pada jumlah peserta dan belum memiliki strategi pemasaran yang terstruktur. Dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi warga binaan belum sepenuhnya terlihat karena belum terbangunnya jaringan kemitraan eksternal.
Barbershop	Program barbershop memberikan dampak positif dalam meningkatkan keterampilan jasa dan etos kerja. Program ini memberikan pemasukan mandiri dengan tarif jasa potong rambut sebesar Rp15.000. Namun, keterbatasan ruang operasional dan jumlah peserta menyebabkan antrean panjang, yang berpotensi menurunkan efisiensi layanan. Belum ada pelatihan lanjutan atau sertifikasi resmi, sehingga program ini belum optimal dalam mempersiapkan peserta bersaing di luar lembaga. Penguatan kelembagaan dan jejaring pelatihan diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing program.

Pertukangan Kayu	Program pertukangan kayu memberikan kontribusi positif dalam penguasaan keterampilan dasar pengolahan kayu. Program ini memenuhi kebutuhan internal lapas, seperti pembuatan furnitur sederhana, dan melatih kedisiplinan serta tanggung jawab peserta. Namun, keterbatasan bahan baku dan alat produksi menyebabkan hasil karya belum optimal dalam kuantitas dan kualitas. Tanpa kemitraan industri dan pelatihan lanjutan, program ini kesulitan bersaing di pasar eksternal. Penguatan sumber daya dan jejaring eksternal diperlukan untuk meningkatkan dampak jangka panjang.
------------------	--

1) Bakery

Evaluasi sumatif terhadap program pembinaan bakery di Lapas Kelas IIB Muara Enim menunjukkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif dalam membekali warga binaan dengan keterampilan dasar tata boga dan membentuk karakter kerja yang disiplin. Program ini mampu menciptakan suasana kerja produktif dan menjadi sarana pelatihan yang terstruktur meskipun dalam skala terbatas. Namun, dari sisi luaran, kontribusi program terhadap pencapaian tujuan jangka panjang seperti reintegrasi sosial dan peningkatan ekonomi warga binaan masih belum optimal. Produk yang dihasilkan belum dipasarkan secara luas, dan belum ada indikator capaian yang terukur mengenai keberhasilan alumni program setelah bebas. Tidak adanya sistem pelacakan pasca-pembinaan serta keterbatasan kerja sama dengan pihak eksternal menjadikan evaluasi keberhasilan program hanya bersifat internal. Evaluasi ini merekomendasikan peningkatan pada aspek dokumentasi luaran, penguatan jejaring mitra, serta penyusunan indikator dampak yang jelas guna mengukur kontribusi program terhadap kesiapan hidup bermasyarakat bagi warga binaan.

2) Menjahit

Evaluasi sumatif terhadap program pembinaan menjahit di Lapas Kelas IIB Muara Enim menunjukkan bahwa program ini telah berhasil memberikan bekal keterampilan dasar menjahit kepada warga binaan dan menjadi salah satu bentuk pembinaan yang aplikatif. Kegiatan ini memberi kontribusi positif terhadap peningkatan rasa percaya diri dan kemandirian warga binaan, terutama bagi mereka yang memiliki minat dan bakat di bidang tata busana. Namun, evaluasi akhir menunjukkan bahwa luaran program masih terbatas karena belum ada sistem pelacakan keberlanjutan keterampilan setelah bebas, serta belum tersedia data yang mengukur efektivitas program dalam mendukung

reintegrasi sosial secara konkret. Selain itu, produk hasil jahitan masih difokuskan pada kebutuhan internal lapas dan belum dipasarkan ke luar, sehingga potensi ekonomi dari hasil pembinaan belum dimaksimalkan. Evaluasi ini merekomendasikan penyusunan indikator keberhasilan pasca-program, serta perluasan kemitraan dengan pelaku industri konveksi atau pelatihan lanjutan sebagai langkah strategis peningkatan dampak program²¹.

3) Membatik

Evaluasi sumatif terhadap program pembinaan membatik di Lapas Kelas IIB Muara Enim memperlihatkan bahwa kegiatan ini telah berhasil menjadi sarana pelatihan sekaligus media ekspresi kreatif warga binaan. Program ini berdampak positif dalam membentuk karakter warga binaan, seperti ketelitian, kesabaran, dan ketekunan, yang penting dalam proses pembinaan. Namun, dari sisi capaian akhir, evaluasi menunjukkan bahwa produksi batik masih terbatas dalam kuantitas dan belum memiliki orientasi pasar yang jelas. Produk batik yang dihasilkan belum mampu bersaing secara luas karena kurangnya variasi motif dan inovasi desain. Selain itu, belum ada indikator capaian pasca-pelatihan yang mengukur sejauh mana keterampilan ini dimanfaatkan setelah masa pidana berakhir. Rekomendasi yang muncul dari evaluasi ini antara lain adalah pentingnya peningkatan kapasitas pelatihan, pendampingan profesional, serta kerja sama dengan komunitas batik lokal agar hasil pembinaan memiliki nilai jual dan berkelanjutan.

4) Barbershop

Evaluasi sumatif terhadap program pembinaan barbershop di Lapas Kelas IIB Muara Enim menunjukkan bahwa program ini telah memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dalam bentuk keterampilan kerja yang aplikatif dan potensi ekonomi melalui tarif layanan potong rambut sebesar Rp15.000. Kegiatan ini juga memperkuat rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri peserta karena mereka terlibat langsung dalam pelayanan kepada sesama warga binaan maupun petugas. Namun, keterbatasan ruang dan jumlah peserta menyebabkan beban kerja tidak merata, antrean panjang, serta potensi kelelahan. Selain itu, belum adanya sertifikasi keterampilan atau jejaring kerja sama dengan lembaga pelatihan eksternal membuat keterampilan ini belum memiliki legitimasi yang kuat setelah masa pidana. Evaluasi ini menekankan pentingnya penguatan sistem

²¹ Pasya and Wibowo, "Analisis Peran Serta Teknologi Dalam Inovasi Pelayanan Publik Kepada Narapidana Di Era Disrupsi Masyarakat Di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Muara Enim."

pelatihan, ekspansi fasilitas, dan integrasi program dengan dunia usaha di luar lapas untuk menjamin keberlanjutan hasil pembinaan.

5) Pertukangan Kayu

Evaluasi sumatif terhadap program pembinaan pertukangan kayu di Lapas Kelas IIB Muara Enim menunjukkan bahwa meskipun program ini telah membekali warga binaan dengan keterampilan dasar dalam bidang kerja kayu dan mampu memenuhi kebutuhan internal seperti pembuatan rak dan meja, namun dampaknya masih bersifat terbatas. Keterbatasan bahan baku serta belum optimalnya hasil produksi menyebabkan produk yang dihasilkan belum dapat bersaing secara luas di pasar luar. Selain itu, belum adanya pelatihan lanjutan maupun kerja sama dengan pihak industri atau lembaga pelatihan eksternal membuat keterampilan warga binaan belum berkembang secara maksimal. Kendati demikian, program ini telah membentuk etos kerja dan rasa tanggung jawab peserta, serta memberikan fondasi keterampilan yang dapat dikembangkan lebih lanjut pasca bebas. Evaluasi ini menegaskan pentingnya penguatan kemitraan, penambahan bahan baku, dan sistem pelatihan yang lebih berkelanjutan.

B. Hambatan Pada Program Pembinaan Kemandirian Dalam Kesiapan Hidup Bermasyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim

Dalam pelaksanaan sebuah kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan pastilah akan terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, begitu pula pada pelaksanaan program pembinaan kemandirian dalam kesiapan hidup bermasyarakat di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Muara Enim. Pada masing-masing program pembinaan yang telah dilakukan observasi oleh peneliti, didapati hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian sebagai berikut²²:

1. Sarana dan Prasarana

Hambatan sarana dan prasarana menjadi kendala umum yang dihadapi dalam pelaksanaan lima program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Muara Enim, yakni bakery, menjahit, membatik, barbershop, dan pertukangan kayu. Pada program bakery, keterbatasan peralatan seperti jumlah oven dan mixer yang minim membuat proses produksi harus dilakukan secara bergantian, menghambat efisiensi pelatihan dan pembelajaran. Pada

²² Hermansyah, Hamzah, and Priyatmono, "Peran Dukungan Motivasi Dari Keluarga Terhadap Partisipasi Narapidana Dalam Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim."

unit keterampilan menjahit, beberapa mesin jahit yang digunakan sudah berusia tua dan sering mengalami kerusakan ringan, sehingga mengganggu kontinuitas kegiatan. Program membatik menghadapi keterbatasan dalam ketersediaan peralatan penunjang seperti meja kerja yang cukup dan perlengkapan pelindung diri, serta terbatasnya pewarna alami yang berkualitas baik. Di unit barbershop, sarana kerja seperti alat cukur dan kursi pangkas masih terbatas jumlahnya dan kurang memadai untuk melayani antrian panjang. Sementara itu, pada program pertukangan kayu, hambatan utama terletak pada keterbatasan bahan baku berupa kayu dan tidak tersedianya alat-alat kerja modern seperti mesin potong presisi, yang berdampak pada kualitas hasil kerja. Terkait sarana dan prasarana, peneliti melakukan wawancara pada warga binaan pekerja terkait hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan program pembinaan, yaitu²³:

(Narasumber 4 OC15) *“Terkait hambatannya sendiri ya itu, alat-alatnya yang kurang, terkadang ada mesin yang rusak dan juga terkadang baterai yang habis jadinya menghambat pelaksanaan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber di Lapas Kelas IIB Muara Enim, diketahui bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian, khususnya pada aspek sarana dan prasarana, terletak pada keterbatasan alat yang tersedia. Narasumber mengungkapkan bahwa beberapa mesin pendukung kegiatan kerap mengalami kerusakan, sementara alat lainnya seperti baterai terkadang habis dan tidak segera diganti atau diisi ulang, sehingga menghambat kelancaran aktivitas pembinaan. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas pelatihan, karena peserta tidak dapat bekerja secara optimal atau bahkan harus menunda kegiatan hingga alat kembali siap digunakan. Senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya mengenai hambatan yang dihadapi pada program pembinaan barbershop, terdapat pula hasil wawancara pada warga binaan pada pembinaan pertukangan kayu:

(Narasumber 5 OC14) *“Untuk sementara ini belum ada kendala yang begitu serius, paling sedikit sedikit seperti keterlambatan pembelian paku, amplas, cat.”*

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun

²³ Sianipar, Sairwona, and Boiliu, “Evaluasi Program Sekolah Minggu Dengan Menggunakan Model Evaluasi CSE-UCLA.”

secara umum pelaksanaan program pembinaan kemandirian pertukangan kayu di Lapas Kelas IIB Muara Enim berjalan lancar, tetap terdapat hambatan kecil yang bersifat teknis. Hambatan tersebut antara lain berupa keterlambatan dalam pengadaan bahan-bahan penunjang seperti paku, amplas, dan cat. Hambatan ini menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip pembinaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan bahwa pembinaan narapidana harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan dengan dukungan sarana serta prasarana yang memadai. Meskipun terlihat sepele, keterlambatan ini dapat berdampak pada kelancaran proses produksi dan menyebabkan warga binaan harus menunda atau memperlambat pengerjaan pesanan. Hal ini menunjukkan perlunya sistem logistik internal yang lebih terorganisir dan responsif agar proses pelatihan dan produksi tetap berjalan secara efektif dan efisien.

2. Pemasaran Produk

Hambatan dalam aspek pemasaran menjadi tantangan signifikan bagi keberlanjutan program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Muara Enim. Meskipun warga binaan telah menghasilkan produk yang layak jual seperti roti, pakaian, batik, jasa potong rambut, dan kerajinan kayu, namun belum tersedia strategi pemasaran yang terstruktur dan efektif. Pada program bakery, hasil produksi masih terbatas dijual di lingkungan internal lapas tanpa upaya distribusi keluar. Begitu pula dengan produk menjahit dan membatik yang belum memiliki merek, kemasan menarik, atau akses ke pasar eksternal, sehingga potensi komersialnya belum tergarap secara maksimal. Program pertukangan kayu menghadapi tantangan serupa, di mana keterbatasan akses keluar dan tidak adanya kerja sama dengan mitra usaha menjadikan hasil kerajinan hanya untuk kebutuhan internal lapas. Adapun wawancara dengan warga binaan pekerja membatik terkait kendala dalam pemasaran produk yaitu:

(Narasumber 2 OC16) “Keluh kesahnya ya kalo jamnya sedang banyak yang biasanya 5 hari selesai mencapai 10 hari, prosesnya bertahap dari penyablonan sampai pewarnaan”

Kutipan hasil wawancara tersebut mencerminkan salah satu hambatan dalam program pembinaan membatik di Lapas Kelas IIB Muara Enim, yaitu terkait durasi penyelesaian produk. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika jumlah pesanan meningkat atau jumlah peserta

terbatas, proses produksi yang biasanya selesai dalam lima hari dapat memakan waktu hingga sepuluh hari. Hal ini disebabkan oleh sifat proses membatik yang bertahap dan memerlukan ketelitian, dimulai dari penyablonan, pewarnaan, hingga fiksasi warna. Selain itu, belum adanya platform promosi seperti media sosial resmi atau e-katalog lembaga membuat produk hasil pembinaan kurang dikenal publik. Tidak tersedianya unit pemasaran atau petugas khusus yang mengelola penjualan juga menyebabkan produk tidak memiliki kesinambungan distribusi. Hambatan ini memperlihatkan bahwa kegiatan pembinaan kemandirian masih belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya terkait kewajiban negara untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana melalui kegiatan produktif yang berkesinambungan.

3. Pengajar/Mentor

Hambatan dari segi pengajar atau mentor merupakan salah satu faktor krusial yang mempengaruhi efektivitas program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Muara Enim. Mayoritas program seperti bakery, menjahit, membatik, barbershop, hingga pertukangan kayu masih sangat bergantung pada kemampuan individu warga binaan yang memiliki keterampilan sebelumnya, tanpa adanya pendampingan langsung dari instruktur profesional. Hal ini menyebabkan proses pelatihan tidak berjalan secara optimal karena materi dan teknik yang diberikan terbatas pada pengalaman praktis yang dimiliki peserta lama. Pada program membatik, misalnya, kurangnya mentor yang kompeten menyebabkan keterampilan hanya bertahan pada level dasar tanpa adanya inovasi motif atau teknik pewarnaan baru. Begitu juga pada program bakery, warga binaan mengandalkan resep dan metode mandiri tanpa standar profesional, sehingga kualitas produk tidak bisa dikembangkan secara maksimal. Adapun wawancara dengan kasubsi giatja terkait kendala dalam pengajar/mentor yaitu:

(Informan 1 OC8) “Oh, tentu ada. Seperti keterbatasan alat, bahan baku yang kadang telat datang, atau juga pelatih yang tidak selalu tersedia. Kadang juga peserta masih gonta-ganti karena masa pidananya selesai. Tapi ya, semua itu kami upayakan terus untuk dicari solusinya.”

Kutipan tersebut mengindikasikan bahwa salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program pembinaan di Lapas Kelas IIB Muara Enim adalah belum konsistennya kehadiran tenaga ahli. Terkadang lapas mendapatkan tenaga ahli dari luar, namun di lain waktu harus

melatih sendiri petugas internal atau warga binaan sebelum mereka bisa menjalankan pelatihan. Proses pelatihan ini memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga menghambat kelancaran program secara keseluruhan. Ketidakteraturan ini mencerminkan belum adanya sistem pelatihan berkelanjutan yang terstruktur. Hambatan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pembinaan belum sepenuhnya memenuhi prinsip profesionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang menekankan pentingnya sumber daya manusia pemasarakatan yang kompeten dan memadai untuk menunjang keberhasilan program pembinaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Muara Enim, ditemukan bahwa program ini telah memberikan kontribusi positif terhadap kesiapan hidup bermasyarakat bagi warga binaan, meskipun menghadapi berbagai hambatan struktural dan fungsional. Pada tahap Need Assessment, terdapat kesenjangan antara kondisi aktual dan ideal, khususnya dalam pemetaan potensi dan minat warga binaan. Perencanaan pelatihan juga masih bersifat umum dan belum terstruktur untuk pengembangan jangka panjang. Pada Formative Evaluation, meskipun program memberikan peningkatan keterampilan teknis dan soft skills, pengawasan dan evaluasi masih belum terstandarisasi. Hambatan teknis seperti keterbatasan alat dan bahan, waktu, serta tenaga pelatih menjadi kendala produktivitas. Di tahap Summative Evaluation, meskipun keterampilan peserta meningkat, kurangnya pemasaran produk dan keterhubungan dengan dunia usaha di luar lapas membatasi dampak ekonomi program. Selain itu, hambatan lain seperti keterbatasan sarana, tenaga pengajar profesional, serta sistem evaluasi yang tidak terstruktur menghambat optimalisasi program. Hambatan non-fisik juga terkait dengan motivasi individu dan dinamika sosial antarwarga binaan, yang memerlukan pendekatan berbasis minat dan kebutuhan personal. Program pembinaan kemandirian memerlukan penguatan pada seluruh dimensi evaluasi untuk mencapai sistem pembinaan yang holistik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Andriani, Siska. "Evaluasi CSE-UCLA Pada Studi Proses Pembelajaran Matematika." *Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika* 6, no. 2 (2015): 167–76.

Divayana, Dewa Gede Hendra. "Evaluasi Pemanfaatan E-Learning Menggunakan Model CSE-

- UCLA.” *Cakrawala Pendidikan*, no. 2 (2017): 87122.
- Hermansyah, Hermansyah, Imaduddin Hamzah, and Budi Priyatmono. “Peran Dukungan Motivasi Dari Keluarga Terhadap Partisipasi Narapidana Dalam Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4873–81.
- Ibrahim, Regina. “Evaluasi Program Pembinaan Kemandirian BIMKER Pastar Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.” *Esensi Pendidikan Inspiratif* 6, no. 4 (2024). <https://journalversa.com/s/index.php/epi/article/view/3298>.
- Jefri, Muh. “Program Pembinaan Kemandirian Pelatihan Kerja Di Lapas Kelas I Makassar.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 2 (2021): 128–37.
- Lubis, Nada Shofa, and Nurul Anriani. “Implementasi Model Center for the Study of Evaluation-University of California in Los Angeles (CSE-UCLA) Dalam Penilaian Kinerja Guru.” *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 2 (2023): 860–66.
- Pasya, Almuqtadir, and Padmono Wibowo. “Analisis Peran Serta Teknologi Dalam Inovasi Pelayanan Publik Kepada Narapidana Di Era Disrupsi Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 462–68.
- Rachman, Fauzi, and Riki Zulfiko. “Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung.” *Yustisi* 11, no. 3 (2024): 378–87.
- Rahmatullah, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lapas Kelas Ii B Singaraja.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 2 (April 2023): 126–36. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i2.2599>.
- Rhamayanti, Raras Feby. “Evaluasi Program Ekstrakurikuler Di SMP Negeri 1 Legok Kabupaten Tangerang.” B.S. thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Risfaisal, Risfaisal, Muhammad Nur Akbar Rasyid, Sitti Mania, and Hania Hania. “Evaluasi CSE-UCLA Pada Studi Proses Pembelajaran Sosiologi Sebagai Penguatan Karakter Peserta Didik.” *Jurnal Kependidikan Media* 13, no. 1 (2024): 95–104.
- Sanusi, Ahmad. “Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 123–38.

-
- Sari, Nina Permata, Muhammad Andri Setiawan, Eklys Cheseda Makaria, Najwa Shabrina Dinanty, and Gazali Rahman. *Pengembangan Model Evaluasi CIPP Untuk Program Bimbingan Dan Konseling Pada Kurikulum Merdeka Tingkat SMK Di Wilayah Lahan Basah*. Universitas Lambung Mangkurat, 2023. <https://repositori.ulm.ac.id/handle/123456789/33432>.
- Semadi, I. Gede Putu, Nyoman Dantes, and Ni Made Sri Mertasari. "Studi Evaluatif Berbasis Model Cse-Ucla Tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Bintara Di Sekolah Polisi Negara Polda Bali." *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2019): 89–105.
- Sianipar, Desi, Wellem Sairwona, and Esti Regina Boiliu. "Evaluasi Program Sekolah Minggu Dengan Menggunakan Model Evaluasi CSE-UCLA." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 2 (2023): 522–40.
- Zakki, Ahmad, Herman Nirwana, and Rezki Hariko. "The Effectiveness of Group Counseling Services in Enhancing Social Support for Wives of Drug Offenders in Correctional Facilities." *Bisma The Journal of Counseling* 8, no. 3 (2024). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/bisma/article/view/90818>.